

**STRATEGI PEREKONOMIAN MYANMAR PASCADEMOKRATISASI TAHUN
2012-2017**
*(MYANMAR'S ECONOMIC STRATEGY IN THE POST-DEMOCRATIZATION ERA
2012-2017)*

Rizqi Maulana Yoesoep

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: rizqirz07@gmail.com

Abstrak: Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang strategi perekonomian Myanmar pascademokratisasi tahun 2012-2017. Penelitian kualitatif ini ditulis dengan memanfaatkan data sekunder melalui rilis resmi, buku, jurnal, dan artikel-artikel berita. Penelitian ini akan membandingkan bagaimana perekonomian di Myanmar dijalankan ketika berada di bawah rezim militer dan rezim sipil. Dalam menjalankan perekonomian negara, dua strategi yang paling umum digunakan adalah dengan mengedepankan *growth strategies* dan mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan pemerataan melalui redistribusi pendapatan atau gabungan keduanya. Untuk kasus Myanmar, latar belakang demokratisasi ini menjadi cara untuk menentukan praktik ekonomi apa yang kemudian dipilih oleh Myanmar. Melalui gabungan kerangka teoritik, *development strategy*, demokrasi, open market, dan privatisasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa pascademokratisasi Myanmar secara umum mengedepankan percepatan pertumbuhan dengan *growth strategies*. Namun, tetap berupaya mengurangi tingkat kemiskinan untuk wilayah-wilayah tertentu dengan pemerataan dan bantuan asing di luar pemerintah.

Abstract: The main focus of this research is about economic strategies of Myanmar post-democratization with range time from 2012 up to 2017. Main sources of this qualitative research are secondary data from official statements, books, journal articles, and news. It will discuss and explain how economic was being run during military governance and civilian governance. Previous studies stated that in running a national economy there are two major strategies namely, growth strategies to promote economic growth and income redistribution to reduce a poverty gap, or a combination of those two. For Myanmar's case, democratization process will be an indicator to decide which economic strategy that was used. This research concludes that Myanmar in general, is using growth strategies to accelerate economic growth. Myanmar is still trying to reduce a poverty gap in particular areas not only with its domestic capacity but also with aids from foreign and non-state actors.

Kata kunci: Demokratisasi, *growth strategies*, Myanmar, rezim militer, rezim sipil

I. **Pendahuluan**

Myanmar merupakan negara yang pernah dikuasai oleh junta militer dari tahun 1962 sampai 2011. Rezim militer menguasai negara dengan tidak mengizinkan pihak lain di luar elit untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Semua sektor dalam menjalankan negara, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, dijalankan tanpa ada campur tangan dari kelompok di luar pemerintah. Ditambah lagi Myanmar menggunakan kebijakan isolasionis yang membuat aktor-aktor di luar batas negara tidak bisa dengan mudah mengintervensi junta militer. Di bawah pemerintahan junta militer, banyak laporan pelanggaran hak asasi kemanusiaan yang tersebar. Myanmar mengalami tekanan dari etnis-etnis minoritas yang melakukan pemberontakan. Rezim militer menggunakan tindakan represif, tidak hanya untuk pemberontak etnis, tetapi juga untuk para oposisi pemerintahan, seperti mahasiswa, aktor keagamaan, dan awak media massa. Selama militer memegang pemerintahan, telah terjadi pergantian dewan keamanan di Myanmar. Dewan keamanan militer pertama yang berkuasa adalah Revolutionary Council (RC) tahun 1962-1988 lalu State Law and Order Restoration Council (SLORC) dan State Peace and Development Council (SPDC) tahun 1988-2011.

Di bidang ekonomi, kebijakan perekonomian Myanmar mengalami perubahan ketika SLORC berkuasa dan digantikan dengan SPDC. Saat masa pemerintahan RC, Myanmar mengedepankan perekonomian yang bersifat sosialis. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa Myanmar di masa ini dijalankan untuk meningkatkan keadilan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Myanmar berupaya untuk mengakhiri pengaruh asing khususnya Barat dan India dan menjadikan Myanmar mampu mengolah sumber daya dan menjalankan perekonomian dengan mandiri. (GlobalSecurity.org, t.thn.) Kebijakan ini berdasarkan paham “Burmese Way to Socialism” yang mengatur semua kegiatan

bernegara Myanmar. Di masa ini Myanmar mulai melakukan nasionalisasi perusahaan asing, melakukan pemerataan dengan mengatur sistem pajak dan subsidi, serta sempat menghentikan bantuan asing hingga tahun 1973, lalu mulai membuka diri pada tahun 1974 dan setelahnya. Investasi asing pun mengalami kesulitan untuk berkembang, hal ini dikarenakan Myanmar memberikan peraturan yang sangat ketat.

Peralihan kekuasaan dari RC menuju SLORC dan SPDC membuat Myanmar menjadi negara yang lebih terbuka dan berorientasi ke pasar. Secara terbatas Myanmar memberikan kelonggaran bagi investasi asing untuk masuk, Partisipasi sektor swasta mulai meningkat dan mempengaruhi perekonomian Myanmar untuk waktu singkat. Selain itu juga, Myanmar mulai terbuka pada dunia internasional dalam lingkup kecil. Beberapa organisasi internasional yang mengedepankan kegiatan perekonomian diikuti oleh Myanmar, seperti, Greater Mekong Sub-Region (GMS) dan juga the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC).

Tindakan represif yang dilakukan rezim militer membuat Myanmar dijatuhi sanksi ekonomi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Myanmar dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya. Tujuan dijatuhkannya embargo ini adalah untuk membuat Myanmar melakukan rekonsiliasi dalam negeri, sekaligus menyebarkan nilai-nilai demokrasi di dalamnya.

Karena kondisi dalam negeri, dari segi ekonomi, politik, dan keamanan, pada tahun 2003, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa akan melakukan upaya demokratisasi melalui Seven-step “Roadmap to Disciplined Democracy”. Proses ini berisi tujuh langkah yang akan dilakukan untuk membuat Myanmar menjadi lebih demokratis. Sampai akhirnya pada tahun 2011, Myanmar mengadakan pemilihan umum presiden secara resmi. Pemilihan umum ini kemudian dimenangkan oleh

Thein Sein, yang merupakan mantan Perdana Menteri Myanmar sebelum mengundurkan diri, dan mendirikan partainya, Union Solidarity Development Party (USDP). Thein Sein menjadi pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis setelah dikuasai rezim militer. Di bawah kepemimpinan baru pascademokratisasi, Myanmar melakukan berbagai reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Myanmar.

II. Pembahasan

a. Kerangka Teoritik

i. *Development Strategy*

Pembangunan adalah sebuah fenomena yang multidimensional. Fenomena ini mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi. Pembangunan memiliki beberapa dimensi, antara lain: *development of civil society; liberal democratic political institutions;* dan *economic growth* (Levy & Fukuyama, 2010). Dalam pembangunan ekonomi, ada dua strategi sentral yang sering digunakan. Pertama, melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan *growth strategies*. Kedua, mengurangi ketidaksetaraan antara kaya-miskin melalui redistribusi pemasukan, atau terkadang gabungan keduanya (Dagdeviren, Hoeven, & Weeks, 2000).

Growth strategies adalah upaya yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Menurut Commission on Growth and Development menjabarkan beberapa ‘bahan’ yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, seperti: desentralisasi; promosi investasi asing; mobilitas sumber daya; dan pemanfaatan ekonomi global (El-Erian & Spence, 2008). Sedangkan Redistribusi pendapatan adalah praktik ekonomi untuk memperkecil ketidaksetaraan pendapatan antara kaya-miskin dan mengurangi kemiskinan. Penerapan ini dapat berupa transfer langsung atau tidak

langsung, dan juga dapat melalui program pajak dari pihak kaya untuk mengangkat kesejahteraan penduduk miskin (Todaro, 1997).

ii. Teori Demokrasi

Robert Dahl menjabarkan bahwa demokrasi memiliki keunggulan dari alternatif lainnya. Demokrasi membuat terhidarnya tirani dan kekuasaan sewenang-wenang, terwujudnya kebebasan umum dan persamaan politik. Dahl menjabarkan bahwa negara dengan sistem demokrasi cenderung lebih makmur daripada negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Hal ini salah satunya disebabkan karena intervensi sewenang-wenang oleh pemerintah dan politisi dalam perekonomian dapat dikurangi. di negara dengan sistem demokrasi dapat terlihat adanya kebebasan dalam menjalankan perekonomian. Pasar yang tidak diatur dan para pekerja bebas melakukan perpindahan. Terjadi persaingan atau kompetisi antar perusahaan dan konsumen dapat memilih barang sesuai keinginan. Negara demokrasi pun dimudahkan karena mereka cenderung mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Mereka dapat dengan mudah melakukan komunikasi, khususnya perekonomian, yang melewati batas negara. Demokrasi juga memungkinkan adanya liberalisasi dalam berkegiatan dengan arah perekonomian yang berorientasi terhadap pasar (Dahl, 2001).

iii. Konsep Open Market

Open Market adalah sebuah sistem ekonomi tanpa batasan untuk membebaskan aktifitas pasar. Sistem ini dicirikan dengan tidak adanya tariff, pajak, lisensi, subsidi, perserikatan (*unionizing*), dan peraturan atau praktik lain yang mengganggu pasar yang sudah berfungsi.

Bentuk ini berbanding terbalik dengan *closed market* atau *protectionist market*. *Closed market* berupaya untuk melindungi produsen-produsen domestiknya dari kompetisi internasional. Sistem ini dapat membatasi siapa yang dapat berpartisipasi dan menentukan harga yang ditentukan bukan berdasarkan permintaan dan suplai (*demand and supply*). Walaupun di lapangan, tidak ada yang seluruhnya menerapkan *open market* maupun *closed market* (Investopedia, t.thn.).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa open market untuk barang, jasa, dan investasi dapat membantu negara-negara untuk menggunakan sumberdaya, *human and physical*, dalam cara yang paling efisien, dengan mengonsentrasikan produksi di sektor yang paling kompetitif (OECD, t.thn.).

iv. Konsep Privatisasi

Privatisasi dapat didefinisikan sebagai proses transfer atau perpindahan kepemilikan usaha, aset, atau properti dari pemerintah ke sektor privat atau swasta. Privatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari nasionalisasi, di mana pemerintah ingin mengambil semua keuntungan dari industri-industri besar, terutama yang memiliki kemungkinan dikontrol oleh kepentingan asing (Britannica, t.thn.).

Privatisasi dapat memberikan keuntungan ketika dijalankan, antara lain: meningkatkan efisiensi; menghilangkan gangguan politik; dan meningkatkan kompetisi. Namun, di sisi lain, privatisasi dianggap mendatangkan gangguan, seperti: terjadi natural monopoly; masalah public interest; dan kesulitan mengatur monopoli swasta (ENotes, t.thn.).

b. Reformasi Ekonomi Myanmar Pascademokratisasi Tahun 2012-2017

i. Strategi Pengurangan Kemiskinan

Pemerintahan Thein Sein menekankan bahwa rural area Myanmar yang jumlahnya mencapai 70% dan merupakan petani dan peternak dapat menjadi motor untuk pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, Thein Sein berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan lalu kemudian meningkatkan produksi di wilayah tersebut. Akan tetapi, upaya untuk mengurangi kemiskinan ini tidak akan berhasil dan memerlukan hibah, bantuan, pinjaman internasional dan teknisi-teknisi asing ahli. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan di rural area, dilakukan dua reformasi ekonomi berikut:

1. Agricultural Loans

Agricultural loans adalah program pinjaman yang bertujuan agar petani terbebas dari utang. Kemudian para petani dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli alat pendukung pertanian dengan harga kompetitif. Dalam menjalankan program ini, dana yang dikeluarkan tidak hanya dari anggaran negara saja. Pinjaman ini mengedepankan public-private partnership dengan agensi dan bank swasta. Program ini merupakan kerja sama antara the Myanmar Agricultural Development Bank dengan Japan International Cooperation Agency. Selain itu, Myanmar juga membuka kesempatan bagi seluruh perusahaan untuk menjual dan memasarkan barangnya. Selain untuk perusahaan, pemerintah Myanmar juga memberikan kesempatan bagi bank-bank swasta untuk berpartisipasi dikarenakan keterbatasan sumber dayayang dimiliki oleh Myanmar Agricultural Development Bank (Aung, 2017).

2. Penetapan Pendapatan Minimal dan Penyediaan Pasar Domestik

Pemerintah Myanmar menjanjikan distribusi sumber daya yang akan diprioritaskan bagi pasar domestik sebelum dijadikan komoditas impor. Sumber daya yang dijanjikan adalah gas alam yang merupakan komoditas utama yang dimiliki Myanmar. Di samping penyediaan sumber daya untuk pasar domestik, masyarakat juga akan mendapatkan suplai listrik setelah suplai bagi industri dipotong dan dialihkan. Pemerintah juga meminta harga kartu selular agar diturunkan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Ditambah juga pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, rel, dan bandara akan ditingkatkan untuk mempermudah mobilitas masyarakatnya (Qingrun, 2013).

ii. Myanmar Foreign Investment Law 2012 dan 2016

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Myanmar adalah mengenai peraturan investasi asing. Di bawah rezim militer, Myanmar sudah membuka kesempatan bagi investor dan perusahaan asing untuk masuk. Namun, kontrol dari pemerintah masih begitu tinggi dan membuat investor-investor tidak leluasa untuk melakukan investasi. Dalam rentang tahun 2012-2017, ada dua hukum investasi asing yang disahkan oleh parlemen. Hukum pertama adalah Myanmar Foreign Direct Investment Law (FIL) tahun 2012. Kemudian kedua adalah Myanmar Foreign Direct Investment Law tahun 2016. Kedua hukum ini disahkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi proses investasi asing dari dengan menyempurnakan hukum sebelumnya.

Myanmar FIL 2012, merupakan peraturan yang menggantikan hukum investasi asing tahun 1988. FIL 2012 ini berisi beberapa

peraturan yang menggantikan hukum sebelumnya. Peraturan ini mengamandemen aturan yang mengharuskan perusahaan asing untuk melakukan *joint ventures* dengan perusahaan lokal, dengan mengizinkan 100% perusahaan asing untuk berinvestasi. FIL 2012 juga menghilangkan aturan modal minimal bagi perusahaan asing dari yang ditentukan nominalnya menjadi sepenuhnya di tangan Myanmar Investment Committee (MIC). Dari dua belas aktifitas yang dilarang dimasuki investasi, dalam hukum tahun 2012 berkurang menjadi empat saja sebagian dengan alasan keamanan dan masalah lingkungan. Amandemen ini sampai pada masalah jaminan hukum bagi investor, langkah penyelesaian sengketa dan pemberian penalti atas pelanggaran perjanjian (Duffield, Cheung, & Nair, 2012).

Hukum investasi asing tahun 2012 masih memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari segi teknis penyusunan dan juga substansi. Dari segi teknis penyusunan, dilakukan perbaikan kualitas konsepsi FIL. Penghilangan kata-kata yang tidak perlu dan penyempurnaan tata bahasa menjadi perhatian dalam hukum ini. Untuk masalah substansi, dilakukan amandemen mengenai proses untuk mendapatkan izin dari MIC. Hukum 2012 mengharuskan semua perusahaan, besar maupun kecil, untuk melalui proses seleksi. Proses ini terkadang memakan waktu hingga beberapa bulan. Lamanya proses ini membuat investor mengalami kerugian dan harus melakukan konsultasi dengan firma-firma hukum beberapa kali.

Untuk itu, FIL 2016 mengeluarkan dua kategori izin baru, yakni, MIC Permit dan MIC Approval. MIC Approval adalah izin bagi perusahaan kecil untuk berinvestasi di Myanmar. Syarat yang diberikan juga cukup mudah sehingga tidak perlu melalui proses yang lama seperti perusahaan besar. Untuk perusahaan besar harus melalui MIC Permit. Terdapat syarat yang cukup banyak bagi perusahaan besar

agar dapat memperoleh izin dari MIC. MIC Approval diberikan bagi perusahaan yang membutuhkan persetujuan untuk menggunakan lahan negara dan untuk perusahaan yang mencari insentif pajak. Sedangkan MIC Permit diperlukan bagi perusahaan yang akan melakukan bisnis strategi (belum didefinisikan), bisnis dengan modal besar (belum ditentukan), bisnis dengan dampak besar bagi lingkungan dan habitat lokal, dan bisnis lain yang menurut MIC memerlukan permit dan bukan approval (Vanderbruggen, 2016)

iii. Privatisasi

Nasionalisasi perusahaan membuat Myanmar mengeluarkan banyak biaya untuk menyubsidi perusahaan-perusahaan tersebut. Ditambah lagi perusahaan yang dinasionalisasi tidak menghasilkan keuntungan dan diperparah dengan tingginya tingkat korupsi di Myanmar. Oleh karena itu, pada tahun 2012, Myanmar melakukan program joint ventures agar perusahaan nasional lebih kompetitif. Selanjutnya, Myanmar mulai mengarahkan perusahaannya untuk dijadikan *public-private partnership*, dikorporatisasi, dan diprivatisasi.

Menteri Perencanaan dan Keuangan pada saat itu, Kyaw Win, memberikan pernyataan bahwa “*a government doesn’t need to do business for the development of a country. It only need to make laws, rules, and regulations to support the development. If we continue running those loss-making industries, the losses will simply increased.*” (ElevenMyanmar, 2017).

iv. Integrasi dengan Sistem Perekonomian Global

Pascademokratisasi tahun 2012 Myanmar mulai memperluas integrasinya terhadap perekonomian global dengan mengikuti kerja sama multilateral dan bilateral. Proses ini tidak dimulai dari nol, karena ketika di bawah rezim militer pun sudah ada beberapa kerja sama

internasional perekonomian yang diikuti oleh Myanmar. Pada waktu tersebut, keanggotaan Myanmar masih cukup terbatas pada kerja sama regional, walaupun ada kerja sama perekonomian yang lebih global. Tercatat Myanmar sudah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1995. Kemudian secara bertahap, Myanmar mengikuti perjanjian perdagangan AFTA setelah bergabung dengan ASEAN tahun 1997. Kerja sama perekonomian lain yang diikuti Myanmar adalah Greater Mekong Sub-region (GMS) dan the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). Dua kerja sama tersebut mengedepankan sektor ekonomi dan teknologi dan dipersatukan melalui kedekatan geografis.

Setelah menjadi negara demokrasi, Myanmar mulai memperluas kerja sama melalui ASEAN yang memiliki hubungan dengan Australia dan Selandia Baru. Myanmar juga berupaya untuk mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Walaupun dari dalam negeri Myanmar sendiri masih ada kelompok pemikir yang meragukan dan mempertanyakan kesiapan Myanmar dalam mengikuti kerja sama perdagangan bebas ini.

v. Reformasi Hubungan Bilateral Myanmar

1. Hubungan Bilateral Ekonomi Myanmar dengan Tiongkok

Ketika Myanmar dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, Myanmar beralih mendekati Tiongkok untuk bekerja sama dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Myanmar dan Tiongkok menjalin kerja sama cukup erat dari tahun 1988 hingga 2012. Tiongkok menjadi investor terbesar Myanmar dan terlibat dalam berbagai proses pembangunan. Myanmar pun

menjadi penyuplai sumber daya alam bagi Tiongkok dan menjadi gerbang untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional.

Kerja sama ini kemudian mengalami perubahan, karena di satu sisi, Myanmar menganggap Tiongkok memanfaatkan Myanmar dan kerja sama keduanya tidak seimbang dan tidak begitu menguntungkan Myanmar. Di bawah pemerintahan Thein Sein, pada tahun 2011, pihak Myanmar membatalkan kerja sama pembangunan Bendungan Myitsone yang sudah dimulai sejak 2006. Pembatalan ini didasari karena adanya penolakan dari masyarakat, peneliti, dan aktifis, mengenai dampak lingkungan dari pembangunan bendungan tersebut. Sebagian pengamat berpendapat bahwa keputusan ini juga diambil karena perhatian pemerintah Myanmar terhadap pengaruh Tiongkok di dalam negeri. Keputusan ini memberikan sinyal perubahan sikap terhadap ketergantungan Myanmar pada Tiongkok tanpa bermaksud untuk mengonfrontasi dan memutuskan hubungan.

Meskipun pengaruh Tiongkok sedikit menurun seiring dengan masuknya pengaruh Barat, Tiongkok masih menjadi partner ekonomi terbesar di Myanmar. Investasi asal Tiongkok masih menjadi yang terbesar dan negara tersebut masih memberikan pinjaman bagi Myanmar. Kerja sama Myanmar dan Tiongkok berfokus pada pendirian zona ekonomi khusus, pembangunan rute transportasi, dan perluasan jaringan pipa dan gas alam.

2. Hubungan Bilateral Ekonomi Myanmar dengan Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan tekanan bagi Myanmar dan mendorong terjadinya reformasi dalam

negeri. Proses transisi yang dialami Myanmar membuat Amerika Serikat mulai menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan kembali. Di masa kepemimpinan Barack Obama, melalui kunjungan Secretary of State, Hillary Clinton, Amerika menyatakan dukungannya dan kesiapannya membantu proses transisi di Myanmar.

Proses reformasi hubungan bilateral ini ditandai dengan inisiasi Amerika Serikat untuk mengirimkan kembali duta besar untuk Myanmar setelah sebelumnya ditarik pada awal tahun 1990an. Myanmar menyambut baik upaya itu dan menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Hal ini juga didukung karena Myanmar masih membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah perekonomiannya.

Di bidang ekonomi, Amerika Serikat mulai memberlakukan '*targeted easing*' terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan. Dimulai dari sektor agrikultur, pariwisata, telekomunikasi, dan perbankan. Lebih lanjut, hubungan ekonomi antarkedua negara diperdalam dengan adanya U.S.-Myanmar Partnership pada tahun 2016 berdasarkan mutual respect dan kepentingan bersama. Kerja sama ini berfokus pada peningkatan hubungan diplomatik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, Amerika Serikat mengeluarkan portofolio baru bagi Myanmar melalui Development Credit Authority (DCA). Ini adalah program pinjaman bagi perusahaan Myanmar dengan target perusahaan kecil menengah dan milik perempuan (USEmbassy.gov, 2016).

3. Hubungan Bilateral Ekonomi Myanmar dengan Uni Eropa

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang mendorong terjadinya rekonsiliasi dalam negeri Myanmar. Sama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa pun menjatuhkan sanksi yang cukup banyak dan lama bagi Myanmar. Ketika masa transisi Myanmar, Uni Eropa mulai mengangkat semua sanksi dan embargonya kecuali mengenai persenjataan.

Di bidang non-ekonomi, Uni Eropa mendirikan kantor resmi dan mengirimkan delegasi penuh untuk bertempat di Myanmar. Selain itu, dilakukan juga program-program yang mendorong terjadinya stabilitas dan peningkatan keamanan serta kualitas hak asasi manusia. Proses ini dilakukan melalui joint communication yang bernama “*Elements for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity*” pada Juni 2016. Forum komunikasi ini mengedepankan isu seperti: demokrasi; rule of law; good governance; perdamaian; HAM; kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (Commission, 2016).

Kerjasama perekonomian dengan Myanmar berada di bawah skema ‘Everything But Arms’ (EBA). EBA adalah skema perdagangan yang diberlakukan bagi negara-negara miskin agar mendapatkan akses penuh dalam mengekspor barangnya ke Uni Eropa kecuali persenjataan. Di bawah skema EBA, nilai perdagangan kedua negara mencapai 1,55 miliar Euro pada tahun 2012 dari 404 juta Euro pada 2012. Uni Eropa menjadi investor terbesar keempat bagi Myanmar dengan menyumbang 8,2% dari total keseluruhan investasi. Nilai investasi ini berada di bawah Tiongkok (32%), Singapura (27%), dan Hong Kong (13%)

III. Kesimpulan

Pascademokratisasi Myanmar melakukan reformasi perekonomian yang secara umum mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Strategi yang dilakukan oleh Myanmar adalah dengan melakukan privatisasi, mempermudah proses investasi asing, dan memperluas integrasi terhadap perekonomian internasional. Khusus untuk di daerah pedesaan, Myanmar masih mengedepankan upaya pengurangan kemiskinan. Tidak sepenuhnya menggunakan kapasitas domestik dengan sistem perpajakan dan subsidi, tetapi melalui *public-private partnership*. Myanmar juga menggunakan *inward-looking strategies* dengan memberikan pasar domestik sumber daya alam sebelum dijadikan komoditas ekspor.

Demokrasi mempermudah keterlibatan aktor-aktor non-negara dan juga negara selain Myanmar untuk menjalankan perekonomian dalam negeri Myanmar. Sejak terjadi transisi, Myanmar membuka kesempatan bagi pihak lain di luar pemerintah untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam perekonomian. Kontrol negara pun berkurang dan Myanmar mulai beralih menjadi negara yang perekonomiannya berorientasi ke pasar.

Referensi

- Aung, S. (2017, Juli 24). *Myanmar Agricultural Development Bank to loans farmers for buying agricultural equipment*. Dipetik Mei 14, 2018, dari <http://elevenmyanmar.com/local/10698>
- Britannica. (t.thn.). *Privatization*. Diambil kembali dari Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/privatization>
- Commission, E. (2016). *Elements for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity*. Brussels: High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
- Dagdeviren, H., Hoeven, R. v., & Weeks, J. (2000). *Redistribution Matters: Growth for Poverty Reduction*. Working Paper.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Duffield, A., Cheung, K., & Nair, N. (2012). Myanmar The New Foreign Investment Law - An analysis. *Berwin Leighton Paisner*, 1-7.

- El-Erian, M. A., & Spence, M. (2008). *Growth Strategies and Dynamics: Insight from Country Experiences*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
- ElevenMyanmar. (2017, Maret 21). *Myanmar to privatize state-owned factories and workshops*. Dipetik Mei 18, 2018, dari <http://elevenmyanmar.com/business/8403>
- ENotes. (t.thn.). *What are the advantages and disadvantages of the privatisation of government-owned companies such as airlines?* Diambil kembali dari ENotes.com: <https://www.enotes.com/homework-help/advantages-disadvantages-privatization-airlines-455874>
- GlobalSecurity.org. (t.thn.). *Ne Win Military Rule - A Nationalized Economy*. Dipetik April 18, 2018, dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/ne-win-2.htm>
- Investopedia. (t.thn.). *Open Market*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/o/open-market.asp>
- Levy, B., & Fukuyama, F. (2010). *Development Strategy: Integrating Governance and Growth*. The World Bank.
- OECD. (t.thn.). *Do open markets matter or is protectionism the answer?* Diambil kembali dari OECD.org: <http://www.oecd.org/trade/doopenmarketsmatterorisprotectionismtheanswer.htm>
- Qingrun, S. (2013). *Myanmar's Economic Reforms and Development: Prospect and Challenges*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy.
- Todaro, M. P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga / Edisi Keenam / Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- USEmbassy.gov. (2016, September 15). *U.S.-Burma Relations*. Dipetik Mei 19, 2018, dari <https://mm.usembassy.gov/u-s-burma-relations/>
- Vanderbruggen, E. (2016). *What Changes in Practice under the New Investment Law?* Yangon: VDB Loi.